

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN ISU RADIKALISME PADA  
MEDIA ONLINE REPUBLIKA.CO.ID, VOA-ISLAM.COM,  
TEMPO.CO, DAN KOMPAS.COM**

**THE ANALYSIS OF NEWS FRAMING ON RADICALISM ISSUE  
IN ONLINE MEDIAS OF REPUBLIKA.CO.ID, VOA-ISLAM.COM,  
TEMPO.CO AND KOMPAS.COM**

**Erlangga dan Twediana Budi Hapsari, Ph.D**

*Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblagan,  
Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183*

*E-mail : [erlangga.apple23@gmail.com](mailto:erlangga.apple23@gmail.com)  
[twediana@gmail.com](mailto:twediana@gmail.com)*

***Abstrak***

Penelitian ini dilatarbelakangi karena, (1) Adanya kebebasan pers menjadikan media terbagi dua sisi. Satu sisi lahirnya saluran informasi, disisi lain menjadikan media dengan bebas mengeluarkan berita sesuai dengan makna yang diinginkan. (2) Radikalisme dianggap sebagai paham yang mengancam keutuhan negara dan bisa mengarah kepada terorisme. Sedangkan di Indonesia, paham radikalisme selalu disematkan kepada orang Islam. Berdasarkan data Indeks Kerukunan Umat Beragama 2019 yang dilakukan oleh Kementerian Agama, menunjukkan angka rata-rata nasional 73,83. Sedangkan, sejak empat tahun terakhir, lebih rendah dibanding tahun 2015, yang menunjukkan angka rata-rata nasional 75,36. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan isu radikalisme yang dibingkai oleh media online Republika.co.id, Voa-Islam.com, Tempo.co, dan Kompas.com, serta mengetahui perbandingan frames diantara media online tersebut. Untuk mendapatkan data selengkap mungkin peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis framing media model Robert N. Entman. Hasil penelitian ini terdapat 5 isu yang menonjol yaitu (1) Pernyataan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama terkait radikalisme, (2) Pernyataan Mahfud MD sebagai Menkopolhukam terkait radikalisme, (3) Pernyataan Jokowi selaku Presiden terkait radikalisme, (4) Tanggapan tokoh terhadap pernyataan pemerintah terkait radikalisme dan (5) Tanggapan tokoh terhadap pernyataan Jokowi terkait radikalisme. Sedangkan, perbandingan antara media online, Republika.co.id melindungi umat Islam dari tuduhan radikalisme, sedangkan Voa-Islam.com menganggap pemerintah selalu mengarahkan radikalisme kepada umat Islam, lalu Tempo.co menjelaskan secara lengkap pendapat pemerintah terkait apa itu radikalisme dengan tidak terlalu menyudutkan umat Islam serta terkesan mengalihkan kearah lain, dan Kompas.com terkesan tidak terlalu peduli dalam memuat isu radikalisme dengan pemberitaan yang sederhana, terkesan mendukung pemerintah dalam beberapa pendapat akan tetapi menghimbau pemerintah dalam menangani isu tersebut.

*Kata kunci : Analisis framing, radikalisme, media online.*

***Abstract***

The backgrounds of the research are (1) The existing of press freedom makes media divided into two sides. On one side, it emerges information channel, but on the other side, it makes media freely releases news with intended interpretation. (2) Radicalism is considered as a belief that threatens the unity of the nation and can lead to terrorism. In Indonesia, the belief of radicalism is always attached to Muslim people. Based on the data of *Index Kerukunan Umat Beragama* (religious harmony index) in 2019 recorded by Ministry of Religious Affairs, it showed national average value of 73.83. In the last four years, it is lower than that in 2015 showing national average value of 75.36. This research aims at finding out the view of radicalism issue framed by online medias of *Republika.co.id*, *Voa-Islam.com*, *Tempo.co*, and *Kompas.com*, as well as at revealing the comparison of the frames among those online medias. To get the data as complete as possible, the researcher implemented the method of descriptive qualitative approach using the analysis of media framing of Robert N. Entman model. The result of the research shows 5 outstanding issues, namely (1) The statement of Fachrul Razi as the Minister of Religious Affairs related to radicalism, (2) The statement of Mahfud MD as Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs related to radicalism, (3) The statement of Jokowi as the President related to radicalism, (4) The response of public figures towards the statement of the government related to radicalism, and (5) The response of public figures towards the statement of Jokowi related to radicalism. In the comparison among the online medias, *Republika.co.id* protects Muslim people from radicalism accusation, while *Voa-Islam.com* thinks that the government always points radicalism at Muslim people. Then, *Tempo.com* explains thoroughly the opinion of the government related to what radicalism is, by being not really to put Muslim people in the corner and giving impression that *Tempo.com* directs it to somewhere else, while *Kompas.com* seems to not really care when publishing radicalism issue by releasing simple news, and gives impression that it supports the government in some points of view, but suggests the government in dealing with the issue.

Keywords: Framing Analysis, Radicalism, Online Media

## PENDAHULUAN

Di era digital dimana teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat. Majunya perkembangan teknologi ini, dibuktikan dengan mudahnya untuk memperoleh berbagai informasi dari belahan dunia mana pun dengan cepat tanpa ada batasan tempat dan waktu. Segala bentuk komunikasi dan penyebaran informasi dapat berlangsung secara *real-time*. Perkembangan teknologi dan informasi ini berdampak dalam kemajuan media. Adapun fungsi dari media secara *literature* untuk menyebarluaskan informasi, mendidik, menghibur dan mempengaruhi. Dengan adanya fungsi tersebut, media dituntut untuk netral serta independen dalam memuat segala informasi yang ada.

Perkembangan media di Indonesia saat ini begitu pesat. Adanya perkembangan ini dilatarbelakangi oleh kebebasan pers yang muncul setelah dikeluarkan Undang-

Undang No.40 Tahun 1999 pasal empat ayat dua, tentang jaminan dan kebebasan kepada awak media dari ancaman pemberedelan, penyensoran ataupun pelarangan penyiaran.<sup>1</sup> Kebebasan pers terbagi menjadi dua sisi, satu sisi lahirnya saluran informasi tapi disisi lain menjadikan media dengan bebas mengeluarkan berita sesuai dengan makna yang diinginkan, sehingga rawan untuk dimanfaatkan pihak yang memiliki kepentingan. Idealita media harus independen serta netral, dan wartawan yang dituntut untuk bersikap objektif dalam menulis sebuah berita harus berimbang. Sedangkan realitanya, masih banyak dalam penulisan suatu berita adanya hasil dari pemikiran pribadi wartawan, ideologi serta latar belakang media, dan juga pemegang kebijakan seringkali ikut mewarnai makna yang dimuat dalam berita tersebut.

Media menciptakan makna yang diinginkan. Hal ini diperjelas oleh Schramm bahwa media tidak hanya sebagai sarana menyampaikan informasi kepada publik secara apa adanya, akan tetapi tergantung pada kelompok dan ideologi yang mendominasinya yang pada akhirnya setiap penulisan berita tersimpan berbagai kepentingan media, ideologi media dan latar belakang wartawan.<sup>2</sup> Dalam sebuah isu yang ramai diperbincangkan, maka media menjadi yang pertama akan dicari oleh masyarakat. Berita yang selalu dibutuhkan masyarakat menjadi asupan pokok yang selalu dikonsumsi, tidak heran apabila media menjadi perhatian semua golongan masyarakat dalam memahami suatu isu peristiwa. Dapat dilihat isu-isu yang beredar di Indonesia baik dari isu politik, ekonomi, golongan, kriminal, pencemaran nama baik, suku, wilayah, bahkan sampai agama.

Radikalisme menjadi fenomena yang cukup hangat diperbincangkan karena radikalisme dianggap sebagai isu Agama yang dianggap suatu paham yang mengancam keutuhan negara dan bisa mengarah kepada terorisme. Idealita radikalisme ialah sebuah paham atau aliran yang sering berpandangan kolot, bertindak dengan menggunakan kekerasan dan bersifat ekstrem untuk merealisasikan cita-citanya. Sedangkan, realita paham radikalisme selalu disematkan kepada orang Islam. Menurut Sahide bahwa radikalisme bukan fenomena Islam saja, melainkan sudah menjadi fenomena global yang

---

<sup>1</sup> Pers, D. (2006). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. *Dewan Pers*, 11 Oktober. Diakses pada 08 November 2019, Hal. 10.

<sup>2</sup> Hibban, I. (2014). Radikalisme Agama Dalam Kajian Sosiologi. *Journal Sosiologi Reflektif*. Vol. 9, No. 1: 219-223. Diakses pada 08 November 2019, Hal. 3.

melanda dunia ketika suatu keadaan dianggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi gagasannya.<sup>3</sup>

Untuk mengetahui arah pandangan isu radikalisme yang ada di Indonesia, peneliti memulai dengan melihat pandangan pemerintah Indonesia dalam melihat sebuah isu radikalisme yang tengah terjadi. Alasan pengambilan dari pandangan pemerintah ini, karena segala bentuk kejadian yang telah terjadi semenjak 2015 sampai sekarang berada dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Adapun yang akan diteliti oleh peneliti adalah arah pandangan pemerintahan Presiden Jokowi Jilid II, dengan Kabinet Indonesia Maju. Hal ini menjadi alasan yang menarik bagi peneliti karena peneliti ingin menganalisis bagaimana pemerintahan Indonesia pada periode ini mengatasi atau memandang radikalisme yang telah menjadi momok beberapa tahun sebelumnya, yang tidak lain sebagai bentuk kegagalan Pemerintahan Jokowi mengcover isu tersebut.

Adapun data yang ditemukan peneliti berdasarkan hasil pencarian di online terkait tingkat toleransi masyarakat Indonesia, yang disandingkan dengan radikalisme. Bahwa berdasarkan data Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) 2019 yang dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang menunjukkan angka rata-rata Nasional pada poin 73,83 yang termasuk dalam kategori “Rukun Tinggi”. Angka ini termasuk tertinggi dibanding dengan tahun 2018 yang hanya 70,90, akan tetapi masih terendah berdasarkan tahun 2015 yang 75,36.<sup>4</sup> Adanya perbedaan ini menunjukkan tingkat toleransi beragama di Indonesia menurun dari 2015, penurunan ini sejak masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Berdasarkan survei tersebut, Papua Barat menjadi provinsi dengan indeks toleransi tertinggi mencapai angka 80 dan termasuk dalam kategori sangat tinggi, akan tetapi berbanding terbalik dengan provinsi Aceh yang memperoleh nilai terendah di antara provinsi lainnya dengan angka 60.<sup>5</sup> Dalam hal ini dapat dilihat, Kementerian Agama yang dipimpin oleh Fachrul Razi merilis hasil indeks kerukunan umat beragama di Indonesia. Papua yang dengan adanya OPM menjadi provinsi dengan indeks tertinggi, sedangkan Aceh dengan sistem Syariah Islam dan dihuni dengan masyarakat yang

---

<sup>3</sup> Sahide, A. (2015). Isis Bagian dari Hubungan (Respon) Islam-Barat. *Journal Ilmu Ushuluddin*. Vol. 2, No. 4: 360. Diakses pada 08 November 2019, Hal. 360

<sup>4</sup> <https://kemenag.go.id/berita/read/512322>, diakses 02 Januari 2020

<sup>5</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/15/191200965/indeks-kerukunan-umat-beragama-2019-versi-kemenag--papua-barat-tertinggi?page=all>, diakses 02 Januari 2020

dominan Islam menjadi Provinsi yang terendah dari yang lain. Dengan data tersebut penelitian ini mempunyai latar belakang yang saling berkaitan antara idealita, realita dan data yang saling menarik untuk dianalisis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil empat media online, yang dibagi menjadi dua media online berasal dari *background* Islam dan dua media online lainnya berdasarkan media Non-Islam. Keempat media online tersebut ialah yang pertama, media yang lahir dari ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang saat ini target *audience*-nya umat Islam lalu dikelola oleh perusahaan serta menjadi media Nasional yang berbasis komersial yaitu [Republika.co.id](http://Republika.co.id). Kedua, media yang lahir yang dengan memakai nama Islam dan mengusung asas Islam yaitu [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com). Ketiga, media yang lahir dari majalah mingguan, yang selalu mengkritis pemerintah, mengaku media yang selalu dapat dipercaya dan dibredel pada Orba yang berbasis komersial serta menjadi media Nasional yaitu [Tempo.co](http://Tempo.co). Sedangkan, yang keempat yaitu [Kompas.com](http://Kompas.com) yang lahir dari partai katholik atas desakan dari Presiden Soekarno dan menjadi media Nasional.

Adapun tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pandangan isu radikalisme dibingkai oleh media online [Republika.co.id](http://Republika.co.id), [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com), [Tempo.co](http://Tempo.co), dan [Kompas.com](http://Kompas.com). Kedua, mengetahui perbandingan *frames* isu radikalisme pada media online tersebut. Manfaat penelitian ini ada dua macam yaitu, Manfaat secara teoritis, peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangsih untuk memperluas wawasan dan pengembangan teori terkait Disiplin Ilmu Komunikasi, khususnya dalam memperkaya khasanah teori framing media oleh Robert N. Entman terkait bagaimana media membingkai sebuah konstruksi realita sosial dengan respon media dalam pemberitaan suatu isu. Sedangkan, manfaat secara peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi serta pertimbangan jurnalis dalam menulis berita terkait isu radikalisme dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, terkait konsep penelitian analisis framing, radikalisme, dan media online.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan bersumber dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati.<sup>6</sup> Pendekatan kualitatif merupakan sebuah penelitian yang tidak memerlukan teknik penghitungan. Sedangkan, jenis penelitian ini adalah deskriptif, dimana metode ini digunakan untuk menggambarkan makna dari objek penelitian, berdasarkan penemuan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>7</sup> Pada penelitian ini, terdapat tiga konsep yang perlu dioperasionalkan, yaitu (a) Media online dan (b) Framing model Robert N. Entman dan (c) Ciri-ciri paham radikalisme. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi.

Unit analisis pada penelitian ini berupa semua teks berita online mengenai pandangan pemerintah yang baru pada kabinet kerja Jokowi jilid II terhadap isu radikalisme pada media online *Republika.co.id*, *Voa-Islam.com*, *Tempo.co*, dan *Kompas.com* pada rentan waktu tanggal 23 September sampai dengan 08 November 2019 dari keempat media online tersebut. Sehingga peneliti mendapatkan hasil pengelompokan isu pokok berita yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep analisis framing (pembingkaihan). Analisis framing merupakan konsep terbaru dari analisis wacana dalam menganalisis teks media. Konsep framing secara *literature* digunakan untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus dalam sebuah realita oleh media. Pada penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert N. Entman. Entman memiliki dua dimensi besar terkait framing yaitu, seleksi isu dan penonjolan/penekanan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu.

Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan 4 elemen perangkat analisis framing model Entman, sebagai berikut<sup>8</sup> :

**Tabel 3.1 Elemen Perangkat Framing Robert N. Entman**

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?

<sup>6</sup> Moleong, L.J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Hal. 3.

<sup>7</sup> Nawawi, H. (1998). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hal. 63.

<sup>8</sup> Eriyanto. (2011). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKis, Hal. 223.

<i>Moral Evolution</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan apa yang harus ditempuh untuk mengatasi?

Sumber : Buku “Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media”, Penulis Eriyanto 2011.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pencarian yang telah dilakukan peneliti terkait pemberitaan isu radikalisme pada media online *Republika.co.id*, *Voa-Islam.com*, *Tempo.co* dan *Kompas.com* pada rentan waktu 23 Oktober sampai dengan 08 November 2019, ditemukan 44 berita dari *Republika.co.id*, 21 berita dari *Voa-Islam.com*, 9 berita dari *Tempo.co*, dan 9 berita dari *Kompas.com*. Setelah proses pencarian dan pengumpulan berita, peneliti mengelompokkan berita-berita tersebut ke dalam 5 isu yang akan analisis menggunakan elemen Robert N. Entman. Adapun 5 isu tersebut ialah pernyataan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama terkait radikalisme, pernyataan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terkait radikalisme, pernyataan Jokowi selaku Presiden terkait radikalisme, lalu tanggapan tokoh terhadap pernyataan pemerintah terkait radikalisme, serta tanggapan tokoh / ahli terhadap pernyataan Jokowi terkait radikalisme.

Menurut peneliti, pengambilan isu tersebut dianggap sesuai dengan latar belakang penelitian ini. Guna menjelaskan isu radikalisme di Indonesia, peneliti mengambil sudut pandang pemerintah yang dianggap bertanggung jawab untuk menjelaskan dan mengatasi masalah radikalisme yang ada di Indonesia. Hal ini jadi sorotan penting karena setelah pelantikan kabinet kerja jilid II Presiden Jokowi, pemerintah yang baru mengeluarkan tugas penting dan khusus kepada Menteri Agama untuk mengatasi radikalisme dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk melakukan tindakan deradikalisasi. Atas tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada Menag dan Menkopolkam menjadi sebuah sorotan publik terhadap masalah radikalisme saat ini yang menjadi bahan sebuah pemberitaan bagi media. Alasan peneliti mengambil berita pernyataan Menag, Menkopolkam dan Presiden terkait radikalisme agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap arah masalah radikalisme di Indonesia yang dibingkai oleh media. Sedangkan, tanggapan tokoh / ahli terhadap pernyataan pemerintah terkait

radikalisme itu sangat diperlukan, karena dapat melihat respon atas tindakan yang dilakukan pemerintah serta melihat media membingkai respon tersebut.

**Tabel 4.1 Tabel Pengelompokan Isu Berita**

No	Isu Berita	Republika	Voa-Islam	Tempo	Kompas
1	Pernyataan Fachrul Razi selaku Menag	4	1	4	1
2	Pernyataan Mahfud MD selaku Menkopolhukam	4	-	1	1
3	Pernyataan Jokowi selaku Presiden	1	-	1	1
4	Tanggapan Tokoh terhadap Radikalisme	31	19	2	4
5	Tanggapan Tokoh/Ahli terhadap pernyataan Presiden	4	1	1	2
Jumlah		44	21	9	9

Sumber : Hasil pengelompokan Isu berita berdasarkan pengumpulan berita dari empat media.

Berdasarkan hasil pengelompokan isu diatas, peneliti menyeleksi masing-masing berita yang ada pada isu berita untuk dipilih satu berita. Penyeleksian berita ini diambil berdasarkan yang terkuat yang dianggap dapat mewakili dan menjelaskan isu tersebut. Setelah dipilih satu berita pada setiap isu, peneliti akan melakukan analisis framing pada masing-masing berita tersebut. Dari hasil pengelompokan diatas, berdasarkan seleksi isu menurut Entman yang menjelaskan bahwa penyeleksian isu digunakan untuk mengetahui bagaimana media memandang isu tersebut. Penyeleksian isu tersebut dapat menentukan penting tidaknya isu radikalisme bagi media tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah pemberitaan radikalisme pada masing-masing media. Banyak dan sedikit pemberitaan menunjukkan dalam media bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa keempat media peduli terhadap isu radikalisme dan dianggap penting untuk diberitakan.

Pertama, dari gambaran framing media online [Republika.co.id](http://Republika.co.id), dapat ditarik kesimpulan yaitu menjelaskan bahwa Presiden Jokowi membayangkan belakangan ini adanya potensi-potensi radikalisme yang cukup kuat dan semakin marak terjadi. Pemerintah mengartikan bahwa radikalisme adalah kelompok yang ingin mengganti Pancasila serta Undang-Undang (UUD) 1945. Sedangkan Pemerintah tidak pernah mengatakan umat Islam itu sebagai kelompok radikal. Memang pemerintah mengakui ada kelompok radikal, akan tetapi bukanlah berasal dari umat Islam. Kelompok ini



menganggap bahwa Pancasila dan UUD tidak cocok dengan paham kelompok mereka karena dianggap bentuk dari *thogut*.

Menurut pemerintah, Islam merupakan agama yang penuh kedamaian dan penuh akan rahmat alam semesta serta mengajak kepada persatuan dan mengokohkan NKRI. Salah jika ada orang Islam melakukan tindakan kekerasan yang mengarah kepada radikalisme. Karena, jika ada orang Islam yang radikal maka ada yang salah dalam menafsirkan ajaran agama Islam. Pemerintah sedang melakukan upaya-upaya untuk menangani masalah radikalisme oleh sebab itu pemerintah meminta agar masyarakat lebih jernih dalam melihat isu radikalisme agar tidak terlihat seolah-olah pemerintah sedang memerangi umat Islam. Dalam menanggapi pernyataan pemerintah terhadap isu radikalisme, Din mengatakan bahwa radikalisme itu tidak hanya berasal dari paham keagamaan saja karena di Indonesia banyak juga yang ingin mengganti Pancasila seperti paham kapitalisme dan liberalisme yang tidak sesuai dengan Pancasila. Serta radikalisme juga bisa berupa aspek ekonomi dan politik bukan hanya aspek agama saja.

Dari kesimpulan diatas berdasarkan 4 ciri dari paham radikalisme Republika.co.id mencantumkan satu ciri yaitu revolusioner, yang terlihat cenderung melakukan perubahan dengan tindakan kekerasan. Hal ini dapat dilihat dalam pemberitaan pernyataan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama terhadap isu radikalisme “bahwa jalan-jalan kekerasan merupakan penafsiran yang salah dalam memahami ajaran Islam”.

Kedua, dari gambaran framing media online Voa-Islam.com dapat ditarik kesimpulan yaitu pemerintah melihat fenomena tumbuhnya radikalisme yang berbasis agama belakangan ini. Fenomena ini merupakan problem yang penting dan secara khusus mendapatkan perhatian lebih dari semua kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat umum. Pemerintah juga melihat dalam aspek agama keyakinan bukanlah sebuah hal yang radikal. Melainkan mereka yang menjelek-jelekkkan agama, serta mengkafirkan orang lain itu disebut radikal. Radikalisme yang membawa tendensi agama atau berbasis agama dapat berdampak langsung pada kerukunan hidup intra dan antarumat beragama. Menurut Din yang sejatinya umat Islam tidak radikal bahkan yang mempunyai wawasan moderat akan tergerak membela mereka yang dianggap radikal jika diperlakukan tidak adil.

Din juga menegaskan radikalisme memang harus ditolak terutama dalam bentuk tindakan nyata yang ingin memotong akar (*radix*) dari NKRI yang berdasarkan Pancasila. Akan tetapi Presiden dan pemerintah saat ini dianggap tidak bersikap adil dan bijaksana

dalam menangani radikalisme, karena pemerintah berfokus menangani radikalisme dalam lingkup keagamaan saja. Sedangkan, radikalisme itu tidak hanya bermotif keagamaan, tapi juga bermotif politik dan ekonomi juga ada. Bahkan menurut Din ada sikap dan tindakan radikal terhadap negara Pancasila seperti komunisme dan liberalism.

Menurut Irma, label manipulator agama ini tidak jauh-jauh dari label radikalisme yang tentunya akan disematkan kepada umat Islam. Sehingga istilah manipulator ini hanya sebagai narasi yang lebih lunak saja untuk menyebutkan radikalisme. Irma meminta pemerintah untuk menyudahi atau mengakhiri drama perang melawan terorisme, radikalisme atau manipulator agama. Baginya itu hanya akan menambah keresahan dan keterpecahan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah itu fokus saja saat ini pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Dari kesimpulan diatas berdasarkan 4 ciri dari paham radikalisme Voa-Islam.com mencantumkan dua ciri yaitu intoleran yang tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain dan fanatik yang selalu merasa benar sendiri serta menganggap orang lain salah. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan pernyataan Fachrul Razi terhadap isu radikalisme, intoleran dapat dilihat dari perkataan bahwa “radikalisme yang membawa tendensi agama atau berbasis agama dapat berdampak langsung pada kerukunan hidup intra dan antarumat beragama” dan pada ciri fanatik dapat dilihat dari pernyataan yang mengatakan bahwa “Melainkan mereka yang menjelek-jelekkkan agama, serta mengkafirkan orang lain itu disebut radikal”.

Ketiga, dari gambaran framing media online Tempo.co dapat ditarik kesimpulan yaitu radikalisme diartikan oleh pemerintah sebagai orang yang berpikir menyelesaikan ketidaksepahaman atau permasalahan dengan cara kekerasan. Karena segala bentuk kekerasan dalam bentuk apa pun itu disebut radikal. Pemerintah memandang agama mengajarkan menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Jadi aneh jika umat beragama menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan ketidaksepahaman terhadap orang yang berbeda paham. Pemerintah mewaspadaai masalah radikalisme yang mempunyai potensi untuk menghancurkan bangsa Indonesia.

Tapi pemerintah menegaskan bahwa tidak pernah mengatakan umat Islam itu radikal. Menurut pemerintah paham radikal itu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi Negara dengan cara melawan aturan dengan jalan-jalan kekerasan. Serta mereka

yang merusak cara berpikir generasi baru yang menyebabkan anak muda punya pikiran bahwa bernegara dan berkonstitusi seperti yang dilakukan pemerintah salah. Menurut Franz, tokoh agama katolik mengatakan bahwa lemahnya pemberantasan korupsi hanya akan menguntungkan segelintir kelas elite politik. Hal itu akan memperlebar ketimpangan ekonomi di masyarakat yang menjadi cikal bakal tumbuhnya radikalisme.

Dari kesimpulan diatas berdasarkan 4 ciri dari paham radikalisme Tempo.co mencantumkan satu ciri yaitu revolusioner yang cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Hal ini dapat dilihat dari kesimpulan diatas yang mengatakan “paham radikal itu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi Negara dengan cara melawan aturan dengan jalan-jalan kekerasan”

Keempat, dari gambaran framing media online Kompas.com dapat ditarik kesimpulan yaitu pemerintah siap melawan radikalisme, hal ini disampaikan selepas pelantikan kabinet kerja Presiden Jokowi jilid II. Adanya penyebab ini karena belakangan ini potensi-potensi radikalisme menguat di Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa tidak pernah mengatakan umat Islam itu radikal. Radikalisme yang dimaksud yaitu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan serta radikalisme juga yang merusak cara berpikir generasi baru yang menyebabkan anak punya pikiran bahwa bernegara dan berkonstitusi adalah salah. Dalam mengatasi hal ini Presiden Jokowi mencari cara agar ada upaya serius untuk mencegah meluasnya paham radikalisme tersebut. Upaya tersebut dengan mengganti istilah radikalisme dengan manipulator agama.

Dalam menanggapi pernyataan pemerintah terkait radikalisme, Ahmad Fathul Bari selaku juru bicara PKS agar pemerintah merumuskan kembali batasan dan makna radikalisme agar dalam proses menanganinya tidak hanya menasar kepada hal-hal yang bersifat simbolik karena berpotensi menimbulkan narasi kontraproduktif di kalangan masyarakat luas. Dalam menagani radikalisme, pemerintah perlu juga menangani radikalisme secara komprehensif dan holistik dengan melihat berbagai aspek lainnya. Ace menyikapi wacana Presiden Jokowi karena jika negara terlalu ikut campur dalam menyelesaikan masalah pemahaman keagamaan semacam ini akan menimbulkan kegaduhan. Radikalisme kerap mengundang perdebatan, ia menilai pemerintah harus berhati-hati dalam bertindak demi mencegah terjadi resistensi di antara masyarakat.

Oleh sebab itulah Ace menanggapi masalah ini karena ditakutkan akan banyak permasalahan yang lebih kompleks jika pemerintah tidak berhati-hati dalam menyikapinya.

Karena, ini mengarah ke pemahaman dari keagamaan yang sangat sensitive. Menurutnya, Perihal radikalisme agama, ia menilai hal tersebut sangat berbahaya karena melanggar nilai-nilai dalam agama itu sendiri. Seperti melanggar nilai-nilai kemanusiaan, padahal sejatinya dalam agama seharusnya tidak boleh melakukan kekerasan. Dari kesimpulan diatas berdasarkan 4 ciri dari paham radikalisme Kompas.com mencantumkan satu ciri yaitu revolusioner yang cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Hal ini dapat dilihat dari kesimpulan diatas yang mengatakan “Seperti melanggar nilai-nilai kemanusiaan, padahal sejatinya dalam agama seharusnya tidak boleh melakukan kekerasan”

### **Perbandingan Framing pada Media Online**

Pandangan setiap media dalam melihat suatu isu akan berbeda-beda antar satu media dengan media yang lainnya. Perbedaan ini ada karena media satu dengan yang lainnya mempunyai latar belakang yang saling berbeda, baik dari sejarah berdiri, pemilik media, visi dan misi, serta ideologi yang dianut media akan sangat mempengaruhi isi dalam pemberitaan. Oleh sebab itu, peneliti membandingkan media online Republika.co.id, Voa-Islam.com, Tempo.co, dan Kompas.com untuk melihat bagaimana media tersebut memberitakan isu radikalisme. Setelah menguraikan perbandingan *frames* keempat media online tersebut yang berdasarkan elemen model framing Entman, serta telah melihat bagaimana masing-masing media menyeleksi isu radikalisme ke dalam pemberitaan. Maka dengan adanya perbandingan ini, dapat melihat aspek-aspek apa saja yang ditonjolkan oleh masing-masing media. Oleh sebab itu, peneliti menguraikan perbandingan tersebut ke dalam tabel dengan deskripsi dimasing masing isu berita. Lalu menjelaskan perbedaan media dalam menekankan aspek yang ingin ditonjolkan. Setelah itu, dapat dilihat arah pandang dari masing-masing media dalam memandang isu pemberitaan tersebut. Karena, berdasarkan latar belakang masalah media tidak dapat dikatakan netral, pasti ada sebuah makna yang telah dibangun pada pemberitaan isu. Makna yang dibangun inilah yang menunjukkan media tersebut mengarah kemana, baik itu dalam bentuk pro dan kontra, memberitakan dan tidak memberitakan, memberitakan secara lengkap atau sederhana.

Kesimpulan dari perbandingan pemberitaan “isu pernyataan Fachrul Razi selaku Menteri Agama terhadap radikalisme” pada keempat media online tersebut saling berbeda berdasarkan pengambilan fokus masalah yang dilihatnya. Republika.co.id menyorot ke arah alasan pemerintah memilih Fachrul Razi yang bukan dari ulama di beri tugas menangani

radikalisme, terus menunjukkan bahwa Fachrul Razi masih menyusun upaya dalam menangkal radikalisme di Indonesia, belum ada bentuk tindakan yang nyata, sehingga terkesan terobosan yang menjadi alasan untuk menangani radikalisme seperti tidak dapat dibuktikan pada saat itu juga. Akan tetapi [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menekankan bahwa Islam yang mengajak persatuan dan mengokohkan NKRI, dari sini [Republika.co.id](http://Republika.co.id) memberitakan orang Islam bukan apa yang dipandang oleh dunia bahwa penyebab radikal.

Berdasarkan gambaran dari arah pemberitaan ini, terlihat [Republika.co.id](http://Republika.co.id) mengarahkan bahwa Islam tidak seperti apa yang disorot sebagai agama teroris yang berpaham radikal. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) mengarahkan radikal sebagai sebuah bentuk kekerasan. Jika ada orang atau oknum kelompok yang mengaku beragama Islam dan dikatakan sebagai radikal radikal maka oknum tersebut telah keliru atau salah dalam menafsirkan agama Islam. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kutipan berita “jalan-jalan kekerasan merupakan penafsiran yang salah atas Islam”. Karena pada dasarnya dalam kutipan “Islam rahmatan lil alamin, kok bisa ngajak musuh apalagi sampai ngajak membunuh banyak manusia pasti ada yang salah“, menjelaskan bahwa Islam itu agama yang penuh akan rahmat. Dari sini terlihat bahwa media online [Republika.co.id](http://Republika.co.id) terkesan pro kepada umat Islam dengan melindungi, membela dan mengarahkan tuduhan radikal itu ke oknum bukan ke umat Islam.

Lalu [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com) mengambil sumber berita ini dari media lain yaitu [vivanews.com](http://vivanews.com), tidak menulis sendiri, adanya pengambilan disini menunjukkan bahwa isi dari berita ini menunjukkan bahwa sesuai dengan pandangannya [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com). Dalam hal [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com) menyorot pada Fachrul Razi sebagai Menag memandang radikal itu sebagai orang yang menjelek-jelekan agama dan mengkafirkan orang lain, dapat dilihat berdasarkan kutipan berita “mereka yang menjelek-jelekan agama, serta mengkafirkan orang lain itu disebut radikal“, pernyataan ini terkesan bahwa [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com) ingin memberitakan pemerintah itu mengarahkan radikalisme itu ke orang Islam karena yang diketahui orang Islam lah yang saat ini sangat mudah sekali mengakirkan orang lain dan menjelek-jelekan agama lain yang tidak sama dan dinilai tidak toleransi. Telihat bahwa media ini sangat kontra kepada pemerintah, dengan secara terang-terangan atas nama pemerintah, menyinggung secara tidak langsung kelompok Islam yang selalu mengkafir-kafirkan orang atau agama lainnya. Dimana dalam hal ini dapat mempengaruhi kerukunan hidup intra dan antar umat beragama di Indonesia.

Sedangkan [Tempo.co](http://Tempo.co) dinilai sangat serius menangani hal ini karena sampai melakukan wawancara khusus kepada Fachrul Razi untuk melihat pandangannya terhadap radikalisme.

Media ini menggambarkan bahwa Fachrul Razi mengarahkan radikalisme kepada orang melakukan kekerasan. Akan tetapi mengarahkan pemberitaan atau pernyataan itu kepada umat Islam itu radikal dengan cara melakukan kekerasan dan berpotensi sampai menghancurkan bangsa. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah mewaspadaai umat Islam yang melakukan kekerasan yang seperti ini yang dapat sangat berbahaya. Terlihat media ini menyudutkan umat Islam dengan memberitakan bahwa pemerintah yang mengatakan semua itu. Hal ini dapat dilihat dari kutipan “kalau ada orang membawa bendera Islam, tapi bicara tentang radikal, maunya main hantam, maunya main bunuh, ya udah lah, itu bukan ajaran Rasulullah itu”, pemberiaan contoh ini menunjukkan arah pembicaraan nya kearah umat Islam.

Dan Kompas.com terkesan tidak peduli dengan isu ini, karena dalam pemberitaannya sangat sederhana dan tidak lengkap serta tidak menunjukkan pro dan kontra pada salah satu pihak. Dapat disimpulkan media ini tidak begitu tertarik dengan isu tersebut. Karena dalam pemberitaan ini, Kompas.com hanya memberitakan kesiapan seorang Fachrul Razi sebagai yang ditunjuk Menteri Agama yang mengaku siap melawan radikalisme, tanpa menuliskan arah pandangan Fachrul Razi terhadap isu radikalisme tersebut. Dapat dilihat dalam kutipan “Fachrul bahkan percaya diri ia dipilih Jokowi karena diyakini bisa melawan radikalisme yang menguat belakangan ini”, hanya menjelaskan kepercayaan diri Fachrul Razi dalam melawan radikalisme yang dipikir memiliki terobosan terbaru.

Kesimpulan dari perbandingan “isu pernyataan Mahfud MD selaku Menkopolkam terhadap radikalisme” pada keempat media online tersebut ialah [Republika.co.id](http://Republika.co.id) sama halnya dengan yang lain dalam memandang peristiwa yang menjadi permasalahan, akan tetapi berbeda sendiri dalam memandang melihat penyebab pemerintah tidak pernah mengatakan umat Islam radikal, lalu mengatakan bahwa karena umat islam tidak radikal maka negara ini sampai sekarang terjaga dengan baik yang dapat dilihat dari kutipan “umat Islam tidak radikal itulah maka negara ini sampai sekarang terjaga dengan baik”. Media ini setuju bahwa ada kelompok radikal yang ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945, akan tetapi media ini secara berbeda dari media lain dan tegas mengatakan bahwa yang diduga sebagai kelompok radikal ini tidak berasal dari umat Islam, hal ini dapat dilihat berdasarka kutipan “Mahfud mengatakan, jumlah kelompok radikal tidak banyak dan bukanlah umat Islam”. Keseluruhan media ini memberitakan secara apa adanya hanya saja menyisipkan sedikit kalimat yang menunjukkan bahwa umat Islam tidak radikal dan pro kepada Pancasila dan menolak paham radikalisme serta

terkesan melindungi umat Islam dari tuduhan radikal, hal ini dapat dilihat dari kutipan “Ia pun menegaskan Muslim di Tanah Air pun menolak keberadaan paham radikal”.

Lalu media Tempo.co dan Kompas.com hampir sama dalam memberitakannya dan terlihat bahwa kedua media ini tidak mengarahkan atau memberitakan pembelaan secara tidak langsung ke umat Islam akan tetapi menyatakan pemerintah dalam menangani hal ini sudah berbuat benar. Dapat dilihat atas kedua media ini sama-sama menekankan bahwa “menegaskan pemerintah tidak pernah mengatakan umat Islam itu radikal”, dan mengatakan dalam menangani atau menindak masalah radikalisme tidak berdasarkan agamanya orang itu. Akan tetapi kenapa yang menjadi ciri-ciri radikalisme itu fanatik agama, yang secara tidak langsung dilihat berdasarkan dia dalam mendalami agamanya, bukan dia beragama atau tidak. Disini menunjukkan bahwa kedua media ini langsung menggunakan kata menindak dan menangani sedangkan Republika.co.id menggunakan kata memilih yang secara tahapannya terlihat tidak gegabah dalam memutuskan permasalahan radikalisme. Yang secara tidak langsung kedua media ini lebih condong ke arah pemerintah dan menjatuhkan umat Islam.

Sedangkan Voa-Islam.com tidak memberitakan isu ini menimbulkan dugaan yang mengarah bahwa pemberitaan isu ini tidak sesuai dengan arah pandang secara ideologi dianut media ini. Dan bisa merugikan jika dimasukkan ke dalam berita, karena bertentangan dengan *statement* yang dibangun dari awal. Pada isu ini pernyataan Mahfud menunjukkan bahwa pemerintah tidak menuduh umat Islam radikal, yang tidak sama dengan paham Voa-Islam yang bertentangan dengan pemerintah dan menganggap pemerintah mengarahkan radikalisme ke umat Islam.

Kesimpulan dari perbandingan “isu pernyataan Jokowi selaku Presiden terhadap radikalisme” pada keempat media online tersebut sangat berbeda satu sama lain dalam memandang isu ini. Republika.co.id mengatakan bisa diganti istilah radikalisme, lalu menekankan radikalisme menjadi perhatian pemerintah jangan cuman sebagai isu yang bias, yang dapat ditafsirkan orang banyak. Disini dapat diambil kesimpulan Republika.co.id memandang isu pergantian istilah ini hanya seperti kemungkinan bisa saja diganti jika pemerintah fokus dalam menanganinya, sesuai dengan kutipan “Jokowi Usul Radikalisme Bisa Diganti Jadi Manipulator Agama”. Lalu Tempo.co dalam memberitakan tidak memberikan penekanan pada *frame* dan terkesan seperti pergantian istilah ini hanya sebuah wacana-wacana Jokowi saja yang diperkirakan tidak bakal terjadi, sekadar pendapat yang tidak kuat, hal ini dapat dilihat dari kutipan

“Jokowi Usul Ganti Istilah Radikalisme Jadi Manipulator Agama”. Akan tetapi media ini menekankan pada isu radikalisme menjadi isu yang perlu disorot.

Sedangkan Kompas.com lebih dominan menyetujui pergantian istilah ini dengan menggunakan kata keinginan untuk istilah radikalisme diganti jadi manipulator agama, dapat dilihat dari kutipan “Presiden Joko Widodo ingin agar istilah radikalisme diganti menjadi manipulator agama”. Media ini sangat mendukung pergantian istilah tersebut karena istilah ini digunakan untuk menyebut orang-orang atau pelaku yang dianggap radikal. Media ini pro atas isu tersebut dalam melakukan pergantian istilah. Lalu media ini terkesan sangat tidak lengkap dalam memberitakan isu tersebut karena tidak dicantumkan moral penyelesaian. Dengan begini media Republika.co.id memandang isu tersebut boleh saja diganti, kalau Tempo.co tidak terlalu peduli pergantian istilah tersebut, lalu Kompas.com sangat mendukung atas pergantian istilah tersebut. Sedangkan Voa-Islam.com yang tidak memberitakan isu tersebut terlihat tidak peduli dan tertarik dengan pernyataan yang disampaikan Jokowi yang kemungkinan terkesan tidak penting.

Kesimpulan dari perbandingan “isu tanggapan tokoh terhadap radikalisme yang disampaikan pemerintah” pada keempat media online tersebut sangat berbeda-beda. Republika.co.id dan Voa-Islam.com mengambil tanggapan dari narasumber yang sama yaitu dari Din Syamsuddin selaku mewakili MUI yang jelas menunjukkan kedua media ini selalu mempertimbangkan berdasarkan pendapat tokoh agama Islam. Akan tetapi, jadi sebuah sorotan yang berbeda terhadap Voa-Islam yang mengambil pendapat dari tokoh Ormas Muhammadiyah ini. Sedangkan Tempo.co mengambil tanggapan dari tokoh yang berlawanan yaitu Franz Magnis Suseno yaitu seorang tokoh katolik. Lalu Kompas.com mengambil tanggapan dari tokoh partai politik Islam yang bertentangan dengan pemerintahan sekarang karena PKS sebagai partai oposisi. Dari isu tersebut sudah sangat terjawab media mana yang pro banget ke Islam dan pro banget ke agama lain lalu mengambil dari lawan pemerintahan sekarang.

Berdasarkan perbandingan arah pandangan pemberitaan Republika.co.id menekankan bahwa umat Islam terkena tuduhan radikalisme dan intoleransi atas pemerintahan Indonesia yang menjadikan pilar dalam menangani keagamaan yaitu Menteri Agama, yang diberi tugas dalam masalah radikalisme, yang menjadikan radikalisme berasal dari umat beragama dan Din merasa diarahkan kepada umat Islam yang selalu tertuduh bermasalah dalam permasalahan radikalisme dan menyinggung soal kerukunan umat beragama di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kutipan “Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Prof Din Syamsuddin



menyampaikan bahwa sebagian umat Islam merasa terkena tuduhan radikalisme dan intoleransi. Tuduhan tersebut terasa menyakitkan bagi umat Islam, padahal kalau umat Islam tidak toleransi tentu tidak akan ada stabilitas dan kerukunan di Indonesia”. Terlihat jelas [Republika.co.id](http://Republika.co.id) berbeda pendapat atas tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada Menteri Agama. Pemberitaan ini menunjukkan penolakan atas pilihan pemerintah yang dapat mengarahkan radikalisme ke umat Islam. Lalu [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com) lebih keras dan terang-terangan menunjukkan bahwa media ini tidak sepakat dan tidak akan pernah setuju atas tindakan pemerintahan saat ini. Hal ini terlihat karena dalam pemberitaan isu tersebut, [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com) langsung mengatakan bahwa Din mengkritisi kebijakan yang diberikan kepada Menteri Agama dalam menangani radikalisme, dapat dilihat dari kutipan “Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Din Syamsuddin mengkritisi tugas khusus yang diberikan Presiden Jokowi kepada Menteri Agama Fachrul Razi untuk mengatasi radikalisme”. Pemberian kebijakan ini ke Menag sangat tendesius diduga malah dapat mengembangkan paham radikalisme itu sendiri. Dan disini, [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com) secara terang-terang bertolak belakang dengan pemerintah dengan menyatakan pemerintah tidak adil dan tidak bijaksana dalam menyingkapi permasalahan radikalisme yang berat sebelah yaitu menyerang umat Islam saja, terlihat jelas dalam kutipan “Di sini, Presiden dan pemerintah tidak bersikap adil dan bijaksana”.

Sedangkan [Tempo.co](http://Tempo.co) dengan mengambil tokoh katolik lebih menekankan pada radikalisme tidak akan mengambil Negara Indonesia, jika yang dijadikan fokusnya itu dalam menguatkan masalah kemiskinan dan korupsi yang ada di Indonesia. [Tempo.co](http://Tempo.co) kali ini memandang dengan cara berseberangan yaitu dengan memilih tokoh non-Islam dalam menanggapi perihal radikalisme ini dan mengalihkan arah pandangan bahwa radikalisme itu berasal dari umat Islam, hal ini menjadikan media ini tidak begitu ingin membahas dari sudut pandang agama akan tetapi dari sudut pandang keadaan rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan kutipan “Tokoh Katolik Romo Franz Magnis Suseno menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat melawan penyebaran radikalisme melalui penguatan pemberantasan korupsi. Dia mengatakan akar dari radikalisme ialah kemiskinan dan pemberantasan korupsi”. Dan untuk [Kompas.com](http://Kompas.com) lebih memilih tanggapan dari lawan politiknya pemerintahan saat ini. Media ini menekankan pada fokus batasan dan makna radikalisme yang dibuat pemerintah saat ini yang tidak konsisten dan jelas. Menurutnya malah mengarah kepada hal simbolik bukan berdasarkan *komprehensif* dan *holistic*. Dapat dilihat dari kutipan “Fathul Bari menilai, dalam menangani radikalisme sebaiknya tidak hanya menyasar kepada hal-hal yang

bersifat simbolik. Menag perlu melihat penanganan radikalisme harus secara komprehensif dan holistik melihat berbagai aspek”.

Kesimpulan dari perbandingan “isu tanggapan tokoh / ahli terhadap pernyataan disampaikan Presiden Jokowi” pada keempat media online tersebut atas pemberitaan pernyataan Presiden mengganti istilah radikalisme. *Republika.co.id* menganggap pergantian istilah ini bisa saja sebagai bentuk fokus pemerintah. Oleh sebab itu dalam tanggapan ini, *Republika.co.id* mengatakan sah-sah saja mengganti istilah radikalisme dengan manipulator agama, hal ini dapat dilihat dari kutipan “Ahli bahasa di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sriyanto mengatakan sah-sah saja jika Presiden Joko Widodo ingin mengganti kata 'radikalisme' menjadi manipulator agama”. Pada pemberitaan ini *Republika.co.id* mengambil dari *Antara.com*, yang menunjukkan kuat bahwa berita ini menjadi berita yang menunjukkan gambaran kuat arah pandang dalam menanggapi isu tersebut. Hal ini menunjukkan *Republika.co.id* ketika berkaitan dengan pernyataan Presiden Jokowi terkesan baik dan melindungi, dalam hal ini peneliti melihat adanya sebuah konspirasi berbeda, apakah ini terjadi karena Direktur *Republika.co.id* yaitu Erick Thohir yang menjabat sebagai menteri, melindungi citra dan selalu setuju dengan statement Presiden Jokowi

Sedangkan *Voa-Islam.com* menanggapi isu tersebut tanpa memberitakan berita pernyataan usulan pergantian istilah radikalisme akan tetapi menanggapi. Hal ini menjadi menarik karena dapat menunjukkan sebuah argumentasi kuat atas pandangan media ini dalam memberitakan isu tersebut. Tidak adanya pemberitaan dari pernyataan Presiden Jokowi atas pergantian istilah tersebut bisa menempatkan media ini menolak jika ada berita terkait Presiden Jokowi, akan tetapi kalau perihal menanggapi pernyataan dari pemerintah media ini selalu *getol* mengkritisi. Hal ini dapat dilihat dari arah pandangan pemberitaan di media ini, yang mengambil dari opinion khalayak dalam memberitakan isu tersebut dengan menggunakan *statement* yang sangat jelas menuduh bahwa pemerintah itu *biang kerok* dari radikalisme dan mengakambing hitamkan umat Islam sebagai sasarannya guna membungkam jika melakukan kebijakan yang sewenang-wenang, hal ini berdasarkan kutipan “mulai ada kesadaran di tengah masyarakat bahwa istilah radikalisme saat ini sasaran tembaknya adalah umat Islam saja sebagai reaksi sensitifitas pemerintah terhadap umat Islam yang *getol* mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak adil dan tidak mensejahterakan” dan “label manipulator agama ini juga tidak jauh-jauh dari label radikalisme, yaitu tentunya akan di sematkan kepada

kepada umat Islam”. Voa-Islam.com menganggap pergantian istilah itu tidak ada gunanya karena itu sebagai sebuah narasi baru yang dapat lebih menyudutkan umat Islam sebagai akar dari radikalisme, yang sesuai dengan kutipan “Sehingga perlu ada narasi yang lebih lunak dari radikalisme, yaitu manipulator agama”

Sedangkan kalau media online Tempo.co melihat pergantian istilah itu sebagai upaya Presiden Jokowi untuk mencegah perluasan radikalisme dengan sikap kepeduliannya dalam penyebutan permasalahan tersebut. Hal ini Tempo.co dapat dikatakan setuju atas usulan tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah peduli dalam menangani masalah radikalisme ini, yang dapat dilihat berdasarkan kutipan “Apapun istilahnya, apakah itu manipulator agama atau perusuh agama, perusuh yang menciptakan situasi yang bisa menceraikan bangsa Indonesia, itu harus kita tolak bersama saya kira itu yang harus dipahami adalah semangat bapak presiden memahami agama”. Dan Kompas.com memandang terkait pandangan pemberitaan ini mengambil dari tokoh DPR, yang mengingatkan bahwa sebagai sebuah kehati-hatian pemerintahan dalam mengambil setiap sikap dan keputusan, berdasarkan kutipan “pemerintah harus berhati-hati dalam bertindak demi mencegah terjadi resistensi di antara masyarakat”.

Disini dapat dinilai media ini menginginkan isu tersebut harus di diskusikan lebih dalam lagi agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Disini terlihat bahwa Kompas.com ingin membawa narasi radikalisme ini agar tidak salah dalam memahami dan menguraikannya, karena sangat sensitive yang membawa nama agama, sebaiknya merumuskan dengan organisasi masyarakat agama yang lebih mengetahuinya, yang dimana usulan tersebut terdapat dalam kutipan “Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah untuk menggandeng organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Islam dalam memerangi radikalisme agama”. Kompas.com dalam imbaunnya terhadap pemerintah guna menangani masalah ini dengan tidak tergesa-gesa dan lebih rinci lagi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini terkait analisis framing pemberitaan isu radikalisme pada media online Republika.co.id, Voa-Islam.com, Tempo.co, dan Kompas.com, peneliti menemukan 5 isu yang menonjol dari pemberitaan isu radikalisme. Untuk menjelaskan kesimpulan dari frame masing masing media serta perbandingan antar keempat media, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan masing-masing yang

dijelaskan dibawah ini, pada media online [Republika.co.id](http://Republika.co.id), peneliti menemukan 44 judul berita yang memuat isu radikalisme dan memberitakan ke-5 isu yang menonjol. Pada media online [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com), peneliti menemukan 21 berita yang memuat isu radikalisme dan memberitakan hanya 3 isu yang menonjol. Pada media online [Tempo.co](http://Tempo.co), peneliti menemukan 9 judul berita yang memuat isu radikalisme dan memberitakan ke-5 isu yang menonjol. Pada media online [Kompas.com](http://Kompas.com), peneliti menemukan 9 judul berita yang memuat isu radikalisme dan memberitakan ke-5 isu yang menonjol.

Perbandingan antara keempat media online tersebut ialah [Republika.co.id](http://Republika.co.id) lebih terkesan melindungi dan membela umat Islam dengan tidak memberitakan bahwa umat Islam bukanlah radikal dan media ini sangat setuju dengan Pancasila dan UUD 1945, pemberitaan media ini pro melindungi umat Islam serta mengambil sudut pandang tokoh Islam. [Republika.com](http://Republika.com) juga melindungi statement yang berkaitan dengan Presiden Jokowi terkesan baik dan melindungi, dalam hal ini peneliti melihat adanya sebuah konspirasi berbeda, apakah ini terjadi karena Direktur [Republika.co.id](http://Republika.co.id) yaitu Erick Thohir yang menjabat sebagai menteri, melindungi citra dan dengan statement Presiden Jokowi. [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com) merupakan media yang secara terang-terangan kontra terhadap pemerintah, segala isu yang disampaikan terkesan selalu menyalahkan dan berlawanan dari pemerintah tidak berlaku adil karena dianggap tidak dapat menangani radikalisme dan terkesan zalim kepada umat Islam. Sedangkan [Tempo.co](http://Tempo.co) termasuk media yang lengkap dalam memberitakan isu tersebut berdasarkan semua elemen Entman. [Tempo.co](http://Tempo.co) bisa dikategori tidak pro kearah umat Islam akan tetapi berlawanan dengan [Republika.com](http://Republika.com) dan [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com) yang mengambil tanggapan dari tokoh agama katolik. Sedangkan [Kompas.com](http://Kompas.com) termasuk dalam media yang memberitakannya secara sederhana dan terlihat tidak terlalu peduli akan isu ini serta terlihat tidak terlalu menyudutkan ke arah umat Islam, karena pemberitaannya juga menyudutkan pemerintah atas *statement* yang diberitakan.

Saran untuk peneliti selanjutnya jika ingin meneliti subjek atau objek yang sama, dianjurkan menggunakan model analisis framing yang berbeda, agar dapat menemukan hasil dan pembahasan yang lebih detail serta menemukan sudut pandang yang lainnya. Peneliti menggunakan model analisis framing Robert N. Entman dikarenakan Entman salah satu ahli yang mencetuskan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi dan model ini melihat framing secara lebih rinci dan konsisten dibanding model lain, serta

menawarkan sebuah cara untuk mengungkap isi berita dari pendefinisian masalah sampai ke penyelesain solusi. Alasan lain juga pengambilan model ini dibanding model lain, karena keunggulan model Entman yaitu menawarkan *Moral Judgment* atau evaluasi moral yang menunjukkan sebuah cara media dalam menawarkan sebuah solusi dari sebuah permasalahan dalam berita. Dengan model ini peneliti dapat melihat bagaimana media menyeleksi isu dan menonjolkan aspek tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKis.
- Moleong, L.J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (1998). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, B., Eriyanto, Surdiasis, F. (1999). *Politik Media Pengemas Berita*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Pawito. (2014). *Meneliti Ideologi Media [Catatan Singkat]*. Surakarta: Universitas Sebelas
- Sobur, A. (2015). *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, Dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sopian, A., Eriyanto., Pontoh, C.H., Christanty, L., Setiyono, B., Rini, C., Hamzah, A., Harsono, A. (2009). *Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

### Jurnal Daring

- Hibban, I. (2014). Radikalisme Agama Dalam Kajian Sosiologi. *Journal Sosiologi Reflektif*. Vol. 9, No. 1: 219-223. Diakses pada 08 November 2019. <https://media.neliti.com/media/publications/131291-ID-radikalisme-agama-dalam-kajian-sosiologi.pdf>
- Pradana, D. (2018). Analisis Framing Pemberitaan Tentang Radikalisme Di Kampus Pada Media Republika Online Tahun 2016. *Skripsi Gelar Sarjana*. Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses Pada 24 September 2019. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/societas/article/download/12658/12200>
- Sahide, A. (2015). Isis Bagian dari Hubungan (Respon) Islam-Barat. *Journal Ilmu*

*Ushuluddin*. Vol. 2, No. 4: 360. Diakses pada 08 November 2019.  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ilmu-ushuluddin/article/download/4848/3297>

### **Website**

Pers, D. (2006). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. *Dewan Pers*, 11 Oktober. Diakses pada 08 November 2019.  
<https://dewanpers.or.id/assets/documents/uu/UU-No.-40-Tahun-1999-tentang-Pers.pdf>

<https://kemenag.go.id/berita/read/512322>, diakses 02 Januari 2020

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/15/191200965/indeks-kerukunan-umat-beragama-2019-versi-kemenag--papua-barat-tertinggi?page=all>, diakses 02 Januari 2020

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/15/191200965/indeks-kerukunan-umat-beragama-2019-versi-kemenag--papua-barat-tertinggi?page=all>, diakses 02 Januari 2020

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Erlangga

N I M : 2015 071 0084

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Analisis Framing Pemberitaan Isu Radikalisme Pada Media Online Republika.co.id, Voa-Islam.com, Tempo.co, Dan Kompas.com** benar-benar telah dilakukan dan merupakan karya sendiri. Adapun karya ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar ke sarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



**Erlangga**

NIM 2015 071 0084

# skripsi Erlangga

---

## ORIGINALITY REPORT

---

19%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://nasional.tempo.co">nasional.tempo.co</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://nasional.kompas.com">nasional.kompas.com</a> Internet Source	4%
3	<a href="http://republika.co.id">republika.co.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://nasional.republika.co.id">nasional.republika.co.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://beritaflash.com">beritaflash.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://cinemamasscom.wordpress.com">cinemamasscom.wordpress.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1%

---



10	<a href="http://voa-islam.id">voa-islam.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://eprints.umpo.ac.id">eprints.umpo.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://www.republika.co.id">www.republika.co.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://khazanah.republika.co.id">khazanah.republika.co.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off